

UAS Pancasila semester 1

Nama : Dafa Marchiano

Kelas : RIY

NPM : 202543501298

No. HP : 081383874484

1. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat yang integralistik karena kelima silanya membentuk satu kesatuan nilai yang utuh, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan memberi makna, sehingga Pancasila memandang manusia Indonesia secara menyeluruh sebagai makhluk individu, sosial, dan religius.

Dalam sistem filsafat Pancasila, nilai ketuhanan menjadi landasan moral bagi pelaksanaan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi syarat terciptanya persatuan bangsa. Persatuan Indonesia kemudian menjadi dasar penting bagi terselenggaranya kehidupan politik yang stabil dan demokratis, sehingga masyarakat dan perwakilan dapat berjalan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Keterkaitan antar-sila tampak dalam praktik demokrasi Pancasila, misalnya dalam keputusan mengambil musyawarah mufakat. Musyawarah (silat ke-4) dilakukan dengan menunjung tinggi nilai kemanusiaan (silat ke-2), berlandaskan etika ketuhanan (silat ke-1), dan diarahkan untuk persatuan nasional (silat ke-3). Keputusan yang dihasilkan tidak semata-mata menguntungkan kelompok tertentu, tetapi ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (silat ke-5).

2. etika Pancasila menempatkan individu dan negara dalam hubungan timbal balik yang saling bertanggung jawab. Individu sebagai warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa sesuai nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi, melayani, dan kesejahteraan seluruh warga negara secara adil dan beradab, menjamin HAM, menegakkan hukum secara adil, membuka ruang partisipasi rakyat untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, etika Pancasila menjadi dasar hubungan yang seimbang antara individu dan negara.

3. Secara kritis, Pancasila dapat menjadi filter budaya terhadap dampak negatif Perkembangan IPTEK dengan mempertahankan kemajuan teknologi dalam kerangka nilai ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, sehingga teknologi tidak berkembang secara bebas tanpa kendali moral.

Dalam konteks AI, bioteknologi, dan media digital, Pancasila menuntut agar inovasi tidak melanggar martabat manusia, tidak menimbulkan diskriminasi, serta tidak merusak ~~keharmonisan~~ solidaritas sosial, misalnya melalui penyebaran hoaks atau eksploitasi data pribadi.

4. Sila Persatuan Indonesia dan Sila Keadilan Sosial dapat dijadikan instrumen normatif untuk membangun budaya hukum antikorupsi karena korupsi, kolusi, dan nepotisme pada dasarnya merusak Persatuan bangsa dan menciptakan ketidakadilan struktural. Korupsi menimbulkan ketimpangan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat hukum, serta memperuncing konflik antara masyarakat dan negara, sehingga bertentangan dengan semangat persatuan nasional.

Selain itu, sila Keadilan Sosial menuntut penegakan hukum yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat. Dengan mensudikan kedua sila tersebut menjadi landasan etis dan ideologis, Penegakan hukum antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yudis, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Pada project mikuk saya dengan tema bijak dalam bermedia sosial, melalui kegiatan wawancara yang dilakukan, project ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika, tanggung jawab, dan sikap kritis dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menghadapi hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan informasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah banyak pengurung yang sudah paham mengenai dampak sosial dan hukum dari perilaku bermedia digital. Sehingga project ini relevan sebagai bentuk edukasi awal dan refleksi sosial.

Dalam pembagian tugas kelompok, setiap anggota memiliki peran dan jobdesk yang jelas agar project ini berjalan efektif. beberapa anggota bertugas membuat Laporan ~~perumikuk~~, anggota lain ada yang bertugas dilatngan, seperti dokumentasi Proses wawancara, menjadi orang yang melakukan wawancara dengan narasumber, dan ada anggota yang mengatur keuangan kelompok.

Pembagian tugas ini menunjukkan adanya kerja sama, tanggung jawab, dan musyawarah dalam kelompok, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.